



## Program Nuklir Iran dan Ketegangan dengan Amerika Serikat: Analisis Geopolitik dan Implikasi terhadap Stabilitas Timur Tengah

Eugenia Kana Daniela Timang Seran<sup>1</sup>, Atika Puspita Marzaman<sup>2</sup>,  
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin, Indonesia<sup>1,2</sup>

Alamat: Jl. Perintis Kemerdekaan No.KM.10, Tamalanrea Indah, Kec. Tamalanrea, Kota Makassar,  
Sulawesi Selatan 90245

Korespondensi penulis: [kanaeugenia75@gmail.com](mailto:kanaeugenia75@gmail.com)

**Abstract.** *This study investigates the geopolitical shifts that have occurred between Iran and the United States over Iran's nuclear program and how they have impacted the stability of the Middle East region. The background of this study is the long-standing tensions caused by the United States' suspicions about Iran's nuclear ambitions. These suspicions triggered the JCPOA agreement in 2015 and worsened after the United States withdrew from the JCPOA in 2018. This study aims to gain an understanding of the ways in which strategic geography, threat perceptions, and foreign policy contribute to instability in the region. This study was conducted qualitatively using a descriptive-analytical approach and secondary data obtained from journals, policy reports, and international institutions. The results show that Iran uses its geographic position and support for non-state actors as strategic tools. While the United States pressures Iran through sanctions and military alliances, it also uses its geographic position. These tensions endanger security and destabilize the region. These results are important because they demonstrate the impact of regional nuclear conflicts around the world and suggest that inclusive multilateral diplomacy is needed to resolve conflicts.*

**Keywords:** *Iran nuclear policy, Middle East security, geopolitical tension, U.S.–Iran conflict, JCPOA agreement, regional stability*

**Abstrak.** Studi ini menyelidiki perubahan geopolitik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat mengenai program nuklir Iran dan bagaimana hal itu berdampak pada stabilitas wilayah Timur Tengah. Latar belakang studi ini adalah ketegangan yang berlangsung lama yang disebabkan oleh kecurigaan Amerika Serikat terhadap ambisi nuklir Iran. Kecurigaan ini memicu perjanjian JCPOA pada tahun 2015 dan memburuk setelah Amerika Serikat keluar dari JCPOA pada tahun 2018. Studi ini bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang cara-cara di mana geografi strategis, persepsi ancaman, dan kebijakan luar negeri berkontribusi pada ketidakstabilan di wilayah tersebut. Penelitian ini dilakukan secara kualitatif menggunakan pendekatan deskriptif-analitis dan data sekunder yang diperoleh dari jurnal, laporan kebijakan, dan lembaga internasional. Hasil menunjukkan bahwa Iran menggunakan posisi geografis dan dukungan terhadap aktor non-negara sebagai alat strategis. Sementara Amerika Serikat menekan Iran melalui sanksi dan aliansi militer, mereka juga menggunakan posisi geografis. Ketegangan ini membahayakan keamanan dan mengganggu stabilitas kawasan. Hasil ini penting karena menunjukkan dampak konflik nuklir regional di seluruh dunia dan menunjukkan bahwa diplomasi multilateral yang inklusif diperlukan untuk menyelesaikan konflik.

**Kata kunci:** Kebijakan nuklir Iran, keamanan Timur Tengah, ketegangan geopolitik, konflik AS–Iran, perjanjian JCPOA, stabilitas regional

### 1. LATAR BELAKANG

Dalam studi hubungan internasional, kawasan Timur Tengah menjadi suatu kawasan yang “unik” dan cukup banyak dijadikan bahan penelitian. Kawasan ini sangat berkaitan erat dengan negara-negara *superpower* di dunia, salah satunya Amerika Serikat. Salah satu hal yang cukup menjadi perhatian dunia dalam beberapa dekade terakhir adalah ketegangan yang terjadi antara Amerika Serikat-Iran terkait program nuklir Iran yang menjadi ancaman bagi Amerika Serikat. Perkembangan program nuklir Iran ini dianggap Amerika Serikat sebagai ancaman

karena peran Amerika Serikat itu sendiri sebagai suatu kekuatan di kawasan Timur Tengah. Dalam hal ini, Amerika Serikat memandang ambisi militer Iran sebagai ancaman serius terhadapnya dan juga terhadap stabilitas kawasan.

Ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran semakin memuncak ketika Iran membuat kesepakatan *Joint Comprehensive Plan of Action* (JCPOA) tahun 2015 dengan negara-negara P5+1 (China, Prancis, Rusia, Inggris, Amerika Serikat, dan Jerman) serta Uni Eropa. Perjanjian ini bertujuan untuk membatasi program nuklir Iran agar tidak digunakan untuk tujuan militer dan juga sebagai keringanan atau imbalan atas sanksi internasional yang diberikan kepada Iran. Namun, pada tahun 2018, Amerika Serikat secara sepihak (saat pemerintahan Donald Trump) menarik diri keluar dari perjanjian tersebut dan kembali memberlakukan sanksi terhadap Iran. Menurut pemerintahan Trump, JCPOA gagal mencegah Iran mengembangkan senjata pemusnah massal. Trump juga menerapkan kebijakan *maximum pressure* terhadap Iran yaitu kebijakan yang menggunakan sanksi dan tekanan ekonomi yang kuat untuk memaksa Iran mengubah perilaku terkait program nuklirnya. (Paramasatya, S., & Wiranto, S., 2019: 298-299)

Selanjutnya, Iran, di bawah kepemimpinan Presiden Hassan Rouhani mencoba memperbaiki hubungannya dengan negara lain, menyelamatkan ekonomi nasionalnya, serta menggunakan program nuklir untuk diplomasi dan pertahanan. Bagi Iran, JCPOA merupakan cara untuk melepaskan diri dari sanksi tekanan ekonomi dan pengakuan atas haknya untuk mengembangkan program nuklir secara damai. Tetapi, tetap saja terjadi ketegangan geopolitik di kawasan tersebut dikarenakan negara-negara Barat menganggap bahwa kebijakan luar negeri Iran adalah kebijakan yang konfrontatif, serta semakin diperkeruh karena konflik antara Israel dan Iran. (Mustofa, A. Z., 2021: 130-135)

Ketegangan geopolitik yang berlangsung antara Iran dan Amerika Serikat menunjukkan bahwa masalah nuklir ini tidak hanya mengenai teknologi saja tetapi juga menyangkut ideologi dan kepentingan strategis di wilayah tersebut. Kekhawatiran utama Amerika Serikat yang menyebabkan ketegangan antara kedua negara sejak awal tahun 2000-an adalah ambisi nuklir Iran itu sendiri. Ini bukan hanya berdampak bagi hubungan bilateral Iran dan Amerika Serikat, tetapi juga berdampak pada stabilitas kawasan di Timur Tengah. Iran dicurigai oleh Amerika Serikat bahwa menurut Amerika Serikat, program nuklir Iran disalahgunakan untuk tujuan militer. Sedangkan, menurut Iran program nuklirnya dijamin oleh hak-hak negara-negara penandatangan *Treaty on the Non-Proliferation of Nuclear Weapons* (NPT). Lalu, ketegangan antara kedua negara ini semakin meningkat setelah pada tahun 2018 Amerika Serikat secara sepihak meninggalkan JCPOA, seperti yang sudah saya jelaskan di beberapa paragraf sebelumnya.

Selanjutnya, aspek diplomatik dan teknis dari masalah ini telah dibahas dalam sejumlah penelitian sebelumnya. Misalnya, Bahgat (2006) menggarisbawahi cara Iran mengejar teknologi nuklir yang berlandaskan hak kedaulatan dan keamanan nasional. Lalu, Koblenz (2014), melihat bahaya proliferasi senjata karena ketidakpastian atas niat Iran. Juga, Meier (2013) menganggap JCPOA sebagai suatu langkah penting dalam proses diplomatic antara tiga negara. Metode geopolitik dapat membantu menjelaskan bagaimana kebijakan luar negeri negara-negara besar terhadap Iran dipengaruhi oleh struktur aliansi, persepsi ancaman, dan dinamika special. Misalnya, melalui teori *balance of threat*, Walt (1987) mengatakan bahwa pembentukan aliansi dipengaruhi oleh persepsi ancaman dan kekuatan militer. Ini penting untuk memahami cara negara-negara Teluk dan Israel secara *de facto* membuat tanggapan secara kolektif terhadap Iran. Selain itu, karena Iran berada di dekat Selat Hormuz, yang mana merupakan jalur energi penting di seluruh dunia, konflik dengan Iran dapat berdampak besar pada keamanan global (Cordesman, A.H., 2007)

Berdasarkan pendahuluan yang telah saya paparkan di atas, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana ketegangan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat terkait dengan program nuklir Iran melalui pendekatan geopolitik dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan di Timur Tengah.

## 2. KAJIAN TEORITIS

Dalam studi hubungan internasional, konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat terkait program nuklir Iran adalah masalah yang kompleks dan multidimensional. Untuk memahami dinamika konflik dan ketegangan ini, berbagai teori digunakan, termasuk teori geopolitik, teori *balance of threat*, dan analisis kebijakan luar negeri (*foreign policy analysis*). Pendekatan-pendekatan tersebut memberikan kerangka analitis untuk menilai bagaimana interaksi antara dua negara dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti geografi, persepsi ancaman, dan proses pengambilan keputusan memengaruhi interaksi antara kedua negara dan bagaimana dampaknya terhadap stabilitas regional di Timur Tengah.

Teori geopolitik menekankan bagaimana geografi, kekuasaan, dan kebijakan luar negeri berhubungan satu sama lain. Tokoh klasik seperti Halford Mackinder (1904) dan Nicholas Spykman (1944) memberikan penjelasan tentang bagaimana lokasi geografis suatu negara memberikan keuntungan strategis dan sangat menentukan bagaimana negara tersebut berinteraksi dengan lingkungannya yang mencakup negara-negara lain di sekitarnya. Iran memiliki posisi strategis penting dalam hal ini karena berada di sebelah Selat Hormuz, jalur pelayaran penting yang mengangkut hampir 20% suplai minyak dunia. Oleh karena itu,

keamanan perairan kawasan ini sangat penting untuk stabilitas kawasan, dan konflik yang melibatkan Iran dapat mengubah pasar energi di seluruh dunia.

Pendekatan geopolitik menunjukkan bagaimana negara seperti Iran menggunakan posisi strategisnya sebagai alat tawar politik. Menurut Cordesman (2007), Iran menyadari pentingnya Selat Hormuz bagi perekonomian global dan menggunakan posisinya sebagai strategi pertahanan untuk menghindari tekanan dari Amerika Serikat dan sekutunya. Iran sering menanggapi sanksi ekonomi dari Amerika Serikat ataupun ancaman intervensi dengan manuver militer di kawasan tersebut sebagai sinyal bahwa Iran mempunyai kemampuan dan kapasitas untuk membuat jalur ekonomi global tidak berjalan semestinya atau dengan kata lain mengacaukan jalur ekonomi global.

Tak hanya posisi geografis, Iran dianggap sebagai kekuatan regional yang memiliki pengaruh luas di luar batas teritorialnya karena berbagai faktor, termasuk kepemilikan sumber daya alam, dukungan terhadap kelompok proksi seperti Hizbulah dan Houthi dan juga ideologi Syiah. Borck dan Dolzikova (2022) menunjukkan bahwa Iran secara sistematis memanfaatkan jaringan milisi dan organisasi non-negara untuk memperkuat posisi regionalnya, suatu strategi yang membuat negara-negara tetangganya, termasuk negara-negara Syiah merasa terancam dan juga memunculkan suatu respon keras, terutama dari Israel dan negara-negara Teluk.

Berikutnya, teori *balance of threat*. Teori ini dikembangkan oleh Stephen M. Walt (1987), dari pengembangan teori *balance of power*. Walt mengatakan bahwa negara membentuk aliansi untuk melawan ancaman dan menyeimbangkan kekuatan militer negaranya dengan negara lain. Dalam hal ini, ancaman termasuk intensi agresif, lokasi geografis yang dekat, dan kemampuan militer. Oleh sebab itu, persepsi terhadap ancaman menjadi suatu komponen utama yang menentukan pembentukan aliansi.

Dalam konteks Iran, meskipun Iran belum terbukti secara sah memiliki senjata nuklir, Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Teluk telah menciptakan aliansi *de facto* untuk mengimbangi kekuatan Iran di wilayah tersebut. Sanksi multilateral terhadap Iran, pasukan Amerika Serikat di Teluk, dan kerja sama pertahanan antara Israel dan negara-negara Arab (seperti dalam Abraham Accords) merupakan contoh konkret dari respons terhadap persepsi ancaman tersebut. Sebaliknya, Iran merasa dikepung oleh kekuatan militer Barat dan aliansi-aliansi yang terbentuk di sekitarnya. Inilah yang mendorong kebijakan pertahanan dan nuklir Iran yang defensif, tetapi oleh Barat dianggap agresif. Dalam kerangka ini, muncul semacam *security dilemma*, yakni langkah-langkah keamanan dari suatu negara dianggap suatu ancaman oleh negara lain yang mana menciptakan keraguan dan memicu konflik.

Teori *foreign policy analysis* menjadi sangat penting untuk memahami dinamika kebijakan antara Iran dan Amerika Serikat. *Foreign policy analysis* berkonsentrasi pada cara aktor negara (terutama eksekutif dan elit kebijakan luar negeri) membuat keputusan dalam sistem domestik dan internasional. Dalam hal ini, contohnya keputusan Presiden Donald Trump untuk menarik diri dari JCPOA (*Joint Comprehensive Plan of Action*) tahun 2018 merupakan suatu bentuk kebijakan luar negeri yang didasarkan pada persepsi ideologi dan strategi domestik. Menurut Paramasatya dan Wiranto (2019), keputusan Trump didasarkan pada kalkulasi strategis dan konsistensi kognitif, yakni kecenderungan untuk mempertahankan konsistensi antara persepsi pribadi dan kebijakan luar negeri. Trump melihat JCPOA sebagai perjanjian yang “lemah” dan tidak memberikan jaminan keamanan, meskipun banyak pihak seperti Uni Eropa dan Badan Energi Atom Internasional (IAEA) menyatakan Iran mematuhi perjanjian tersebut. Sebagai respon atas hal tersebut, Trump menerapkan kebijakan *maximum pressure* melalui sanksi ekonomi untuk memaksa Iran berunding dalam kerangka yang tentunya lebih menguntungkan Amerika Serikat.

Presiden Iran saat itu, Hassan Rouhani, mengambil pendekatan pragmatis dalam hubungan luar negeri. Untuk membebaskan Iran dari sanksi ekonomi internasional, Rouhani, seorang pemimpin moderat, menempatkan diplomasi dan keterbukaan sebagai prioritas utama. Menurut Ahmad Zainal Mustofa (2023) bahwa bagi Iran, JCPOA adalah alat untuk mengakui hak Iran dalam pengembangan nuklir secara damai dan juga untuk mencoba menstabilkan ekonomi negara yang tertekan oleh embargo.

Dalam menjelaskan kompleksitas hubungan Iran-AS dan dampaknya terhadap kawasan, ketiga pendekatan di atas bekerja sama dan memperkuat satu sama lain. Iran adalah pusat gravitasi regional karena posisi strategisnya secara geopolitik. Persepsi ancaman terhadap Iran menyebabkan pembentukan aliansi yang mempersulit diplomasi. Di sisi lain, kebijakan luar negeri yang dibuat dipengaruhi oleh dinamika di dalam kedua negara, seperti pergeseran pemimpin dan ideologi turut memengaruhi arah kebijakan luar negeri yang diambil.

### 3. METODE PENELITIAN

Untuk memahami dinamika konflik antara Iran dan Amerika Serikat, yang berfokus pada program nuklir Iran dan dampaknya terhadap stabilitas kawasan Timur Tengah, penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif yang menggunakan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini sangat cocok untuk studi hubungan internasional karena memungkinkan analisis menyeluruh terhadap konteks, persepsi, strategi kebijakan internasional, dan aspek ideologis dari konflik. Kegelisahan yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat bukan hanya masalah

antara dua negara; itu merupakan bagian dari transformasi lanskap geopolitik global, serta cara kebijakan negara-negara besar berinteraksi satu sama lain dan memengaruhi wilayah yang rentan konflik, seperti Timur Tengah.

Tujuan dari pendekatan deskriptif-analitis adalah untuk memberikan gambaran dan analisis fenomena yang didasarkan pada fakta yang ada. Penelitian ini tidak hanya menyajikan data kebijakan dan historis secara kronologis, tetapi juga menganalisis bagaimana kedua negara berinteraksi dan menggunakan strategi diplomatik berdasarkan persepsi ancaman, posisi geopolitik, dan kepentingan nasional dan regional. Dengan menggunakan metode ini, penelitian tidak hanya bertujuan untuk mengungkapkan fakta tetapi juga untuk memberikan interpretasi tentang fakta tersebut dari perspektif teori yang relevan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan. Data ini diperoleh dari berbagai sumber, seperti jurnal akademik, buku ilmiah, dan laporan lembaga riset strategis seperti Royal United Services Institute (RUSI) dan Center for Strategic and International Studies (CSIS). Data juga berasal dari sumber media, seperti Reuters.

Peneliti menggunakan teknik *purposive* sampling untuk mengumpulkan data, yang berarti mereka hanya memilih data yang relevan dan mendukung fokus analisis. Untuk menjaga kredibilitas dan integritas analisis, informasi yang tidak relevan atau tidak dapat diverifikasi dari sumber kredibel dihilangkan. Data dipilih dari periode penting, seperti tahun 2003 (invasi Irak dan peningkatan perhatian terhadap program nuklir Iran), tahun 2015 (penandatanganan JCPOA), dan tahun 2018 (penarikan diri Amerika Serikat dari kesepakatan). Selain itu, data yang dikumpulkan juga diperiksa secara menyeluruh untuk menghindari interpretasi atau bias politik dari media atau aktor tertentu.

Ada tiga pendekatan utama untuk mempelajari hubungan internasional digunakan dalam penelitian ini, yakni teori geopolitik, teori *balance of threat* Stephen M. Walt (1987), dan *foreign policy analysis* (FPA). Teori geopolitik digunakan untuk menentukan bagaimana dinamika wilayah dipengaruhi oleh posisi strategis Iran, terutama hubungannya dengan Selat Hormuz dan peranannya dalam pasar energi global. Teori *balance of threat* atau keseimbangan ancaman digunakan untuk mempelajari bagaimana negara-negara seperti Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Teluk membentuk aliansi karena persepsi ancaman terhadap Iran. Sementara itu, *foreign policy analysis* atau analisis kebijakan luar negeri digunakan untuk menjelaskan bagaimana kalkulasi domestik, ideologi, dan persepsi pribadi tentang Iran memengaruhi keputusan politik elit di luar negeri, seperti keluarnya Amerika Serikat dari JCPOA pada masa pemerintahan Trump.

Teori geopolitik digunakan untuk menjelaskan peran penting Iran dalam arsitektur keamanan global karena lokasinya yang strategis, terutama di sekitar Selat Hormuz, yang merupakan jalur energi penting di dunia. Iran memiliki daya tawar strategis terhadap Barat dengan menguasai jalur ini. Selain itu, lokasi Iran di dekat beberapa wilayah konflik seperti Afghanistan, Irak, dan Teluk Persia membuatnya menjadi penghubung antara Asia Tengah dan Timur Tengah serta menunjukkan peran pentingnya sebagai kekuatan besar dalam strategi global.

Selanjutnya, teori *balance of threat* Stephen M. Walt, dia menganalisis bagaimana negara-negara seperti Amerika Serikat, Israel, dan Arab Saudi membentuk aliansi karena mereka melihat Iran sebagai ancaman karena niat dan proyeksi ideologisnya, bukan hanya kekuatan militernya.. Ini menjelaskan mengapa kebijakan keras diterapkan terhadap Iran karena persepsi ancaman meskipun Iran belum terbukti memiliki senjata nuklir. Konsep ini juga bertanggung jawab atas munculnya Perjanjian Abraham, kerja sama intelijen Israel-Arab Saudi, dan kehadiran militer AS yang meningkat di kawasan Teluk.

Lalu, yang terakhir *foreign policy analysis* (FPA) digunakan untuk menjelaskan bagaimana keputusan luar negeri dipengaruhi oleh faktor internal suatu negara, seperti struktur kekuasaan, ideologi politik, tekanan domestik, dan sifat pemimpin. Dianalisis bahwa keputusan Trump untuk menarik diri dari JCPOA pada 2018 merupakan bagian dari pendekatan ideologis dan strategi kampanye domestik Trump untuk menolak perjanjian internasional yang ditinggali oleh pemerintahan sebelumnya. Di bawah pimpinan Hassan Rouhani, Iran menunjukkan kecenderungan pragmatis dan diplomatis untuk meningkatkan ekonomi negara dan meningkatkan legitimasi internasional.

Dalam penelitian ini, kelebihan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis adalah kemampuan untuk menerima berbagai sudut pandang yang berbeda dan kekompleksan yang ada dalam situasi hubungan internasional. Penelitian ini menggabungkan berbagai teori dan sumber untuk mendapatkan pemahaman yang luas. Tetapi penelitian ini juga memiliki keterbatasan, terutama dalam hal mendapatkan data penting seperti wawancara dengan pembuat kebijakan atau dokumen diplomatik rahasia. Selain itu, interpretasi yang tidak bias disebabkan oleh bias media serta dinamika politik nasional di masing-masing negara.

Secara keseluruhan, metodologi penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan analisis yang menyeluruh, integratif, dan kuat tentang dinamika program nuklir Iran dan ketegangan dengan Amerika Serikat. Diharapkan hasil penelitian ini akan membantu mengembangkan literatur hubungan internasional modern dan menjadi referensi akademik tentang masalah

keamanan kawasan dengan menggabungkan perspektif geopolitik, teori hubungan internasional, dan studi kebijakan luar negeri.

#### **4. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Selama beberapa dekade terakhir, konflik antara Iran dan Amerika Serikat telah menjadi perhatian utama dalam studi geopolitik Timur Tengah. Tidak hanya masalah teknis seperti pengayaan uranium atau kesepakatan diplomatik seperti JCPOA yang menyebabkan ketegangan ini, tetapi juga pergeseran kekuatan, ideologi, dan kepentingan strategis di wilayah tersebut. Karena lokasinya yang strategis di sebelah Selat Hormuz, Iran memainkan peran penting dalam arsitektur keamanan wilayah, seperti yang ditunjukkan oleh landasan teori sebelumnya. Jalur ini merupakan salah satu titik tegangan paling penting di seluruh dunia untuk lalu lintas energi. Ketidakstabilan di Teluk Persia menempatkan ekonomi global dalam bahaya karena ketergantungan dunia terhadap minyaknya (Clingendael Institute, 2020; Arms Control Association, 2019).

Penggunaan Iran terhadap pihak non-negara dalam konflik regional memperparah ketegangan ini. Dalam strategi proyeksi kekuasaan regionalnya, Iran secara aktif mendukung kelompok-kelompok seperti Hizbullah di Lebanon dan Houthi di Yaman. Meskipun mereka tidak berafiliasi secara resmi dengan Iran, kelompok-kelompok ini memiliki kemampuan strategis untuk memperluas pengaruh Iran dan melemahkan sekutu-sekutu Amerika di wilayah tersebut. Strategi ini sangat mirip dengan pendekatan yang disebut para pengamat geopolitik sebagai “asimetris”, di mana negara menggunakan alat-alat non-konvensional untuk melawan tekanan dari kekuatan besar seperti Amerika Serikat (Samaan, 2017; Small Wars Journal, 2022).

Teori *balance of threat* membantu menjelaskan mengapa negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, yang sebelumnya memiliki hubungan dekat dengan Israel, mulai membentuk aliansi secara diam-diam dan bahkan secara resmi dalam bentuk Abraham Accords untuk mengimbangi kekuatan Iran. Dengan menjual senjata, memperluas kehadiran militernya, dan menyatukan sekutu-sekutu regional dalam menghadapi ancaman dari Iran, Amerika Serikat memainkan peran penting dalam membangun sistem keamanan kolektif di kawasan tersebut. Sebaliknya, Iran merasa dikepung oleh Barat dan meningkatkan upaya pertahanannya. Oleh karena itu, Iran mengembangkan program nuklirnya dan mengembangkan rudal balistik (ResearchGate, 2025; Wilson Center, 2021).

Saat JCPOA ditandatangani pada tahun 2015, banyak orang berharap konflik antara Iran dan Amerika Serikat akan mereda. Tapi terpilihnya Donald Trump sebagai Presiden Amerika

Serikat pada tahun 2016 membuat hubungan kedua negara berubah. Trump, yang sangat skeptis terhadap Iran, menganggap JCPOA sebagai perjanjian yang lemah dan menarik diri darinya pada tahun 2018. Selanjutnya, kebijakan *maximum pressure* digunakan, termasuk pemberlakuan kembali sanksi ekonomi dan upaya untuk memaksa negara lain untuk menghentikan hubungan dagang dengan Iran. Meskipun ini berdampak negatif pada ekonomi Iran, ketegangan di seluruh wilayah justru meningkat tajam (Rodriguez, 2022; Arms Control Association, 2019).

Kebijakan *maximum pressure* Trump dianggap lebih dipengaruhi oleh ideologi dan tekanan domestik daripada analisis strategis jangka panjang. Dalam konteks ini, analisis politik internasional menunjukkan bahwa sejak Revolusi Islam 1979, para politisi Amerika lebih cenderung memandang Iran sebagai musuh ideologis. Meskipun administrasi berbeda-beda, persepsi ini membentuk kebijakan luar negeri yang konsisten. Sementara Presiden Trump menerapkan kebijakan yang lebih konfrontatif, Barack Obama memiliki keinginan untuk berbicara dan berdiplomasi dengan Iran. Karena sejumlah hambatan diplomatik, politik, dan domestik yang terjadi di Iran dan Amerika Serikat, Presiden Joe Biden sendiri menghadapi tantangan untuk menghidupkan kembali JCPOA (ResearchGate, 2025; Institute for Peace and Diplomacy, 2022).

Presiden Hassan Rouhani dari Iran melihat JCPOA sebagai langkah penting untuk memperbaiki perekonomian yang terjepit oleh sanksi internasional. Selain itu, ia memanfaatkan kesepakatan ini untuk membuka kembali jalan diplomatik dan mengurangi isolasi Iran dari dunia internasional. Namun, penarikan Amerika Serikat dari perjanjian tersebut melemahkan posisi Rouhani dan memperkuat fraksi konservatif di dalam negeri yang tidak percaya pada niat baik Barat. Sejak saat itu, Iran secara bertahap melanggar beberapa perjanjian JCPOA, termasuk meningkatkan pengayaan uranium lebih dari batas yang disepakati. Hal ini telah menimbulkan kekhawatiran tentang kemungkinan Iran mengembangkan senjata nuklir (Arms Control Association, 2019; Wilson Center, 2021).

Dalam konteks geopolitik global, konflik Iran-Amerika Serikat menunjukkan bagaimana negara-negara besar seperti China dan Rusia mengambil keuntungan dari konflik ini. Dalam upaya mereka untuk menyeimbangkan pengaruh Amerika Serikat di wilayah tersebut, kedua negara tersebut membantu Iran secara diplomatik dan ekonomi. Ini menunjukkan bahwa program nuklir Iran adalah masalah yang tidak hanya terjadi di antara dua negara, tetapi juga merupakan bagian dari persaingan global antara negara-negara terkuat di dunia. Hal ini memperkuat posisi Iran sebagai pion penting dalam permainan besar geopolitik internasional (ResearchGate, 2024; Clingendael Institute, 2020).

Konflik ini berdampak besar pada stabilitas wilayah Timur Tengah. Selama bertahun-tahun, konflik telah menyebabkan perlombaan senjata, ketidakstabilan ekonomi, dan konflik diplomatik antara negara-negara di wilayah tersebut. Yaman, Suriah, dan Lebanon adalah beberapa negara di mana konflik proksi yang didukung Iran dan Amerika Serikat terjadi. Karena kondisi ini, sangat sulit untuk membangun wilayah yang aman dan damai. Kepercayaan, persepsi ancaman, dan politik identitas menyulitkan penyelesaian konflik saat ini dan meningkatkan kemungkinan konflik bersenjata terbuka di masa mendatang (Small Wars Journal, 2022; Samaan, 2017).

Kita dapat memahami hubungan Iran-Amerika Serikat terkait isu nuklir melalui pendekatan integratif yang memadukan geopolitik, keseimbangan ancaman, dan analisis politik internasional. Metode ini menunjukkan bahwa faktor internal, persepsi sejarah, posisi geografis, dan tujuan strategis jangka panjang memengaruhi kebijakan internasional. Oleh karena itu, untuk menyelesaikan perselisihan ini, diperlukan pendekatan yang melibatkan beberapa pihak yaitu negara, lembaga internasional, masyarakat sipil, dan pihak-pihak yang terkena dampak langsung. Tidak ada cara lain untuk mencapai stabilitas yang berkelanjutan di Timur Tengah.

Melanjutkan dari dinamika yang telah disebutkan sebelumnya dalam hubungan Iran-Amerika Serikat, penting untuk menekankan aspek domestik, yang juga memengaruhi kebijakan luar negeri masing-masing negara. Karena sistem politik Amerika Serikat yang demokratis dan terbuka, pergeseran arah kebijakan di luar negeri dapat terjadi karena pergantian pemimpin. Misalnya, Presiden Barack Obama menggunakan pendekatan diplomatis dalam JCPOA yang berbeda dengan kebijakan konfrontatif Presiden Donald Trump, yang menerapkan strategi *maximum pressure*. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan luar negeri AS tidak selalu konsisten, melainkan sangat dipengaruhi oleh dinamika politik dalam negeri dan persepsi ideologis terhadap musuh eksternal.

Sementara itu, eskalasi konflik di seluruh dunia juga memengaruhi politik dalam negeri Iran. Setelah Amerika Serikat keluar dari JCPOA, kelompok konservatif di Iran mendapatkan alasan untuk menekan fraksi moderat yang dipimpin oleh Presiden Hassan Rouhani. Penarikan Amerika Serikat dari perjanjian tersebut melemahkan posisi Rouhani dan menegaskan bahwa perundingan dengan Barat tidak akan berhasil. Kemenangan Ebrahim Raisi dalam pemilu 2021 menandai pergeseran kebijakan luar negeri Iran yang lebih tegas dan condong ke arah konfrontatif, sejalan dengan arus konservatif yang mendominasi parlemen dan lembaga-lembaga penting negara tersebut.

Dipandang sebagai alat pertahanan militer, program nuklir Iran merupakan bukti kedaulatan dan nasionalisme negara. Program nuklir menjadi lambang penentangan terhadap dominasi Barat di tengah tekanan sanksi dan isolasi internasional. Iran menggunakan cerita ini untuk memperkuat dukungan domestik, memperkuat otoritas pemerintah, dan menyatukan rakyat di tengah tekanan ekonomi yang kuat. Dalam banyak kasus, reaksi alternatif terjadi sebagai akibat dari tekanan eksternal, yang terdiri dari peningkatan kemampuan nuklir dan penolakan terhadap keterlibatan lembaga internasional seperti IAEA.

Dinamika yang saling terjalin di kawasan juga meningkatkan ketegangan. Negara di kawasan yang memiliki hubungan diplomatik dengan Amerika Serikat yakni Israel selalu menganggap program nuklir Iran sebagai ancaman bagi eksistensinya. Dalam beberapa tahun terakhir, eskalasi hubungan militer dan intelijen antara Iran dan Amerika Serikat telah terjadi. Salah satu contohnya adalah serangan siber terhadap fasilitas nuklir Iran dan pembunuhan ilmuwan nuklir Mohsen Fakhrizadeh. Israel menegaskan bahwa mereka tidak akan membiarkan Iran memiliki senjata nuklir, meskipun itu berarti mereka bertindak secara sepihak. Strategi ini dan kolaborasi militer Israel-Amerika Serikat meningkatkan ketegangan di Timur Tengah.

Negara-negara Teluk seperti Arab Saudi dan Uni Emirat Arab, di sisi lain, menghadapi masalah keamanan yang serius. Di satu sisi, mereka merasa terancam oleh rencana regional Iran, yang dipandang dari sudut pandang ideologis dan sektarianisme (Sunni versus Syiah). Sebaliknya, mereka tidak ingin konflik terbuka yang dapat mengganggu ekonomi dan stabilitas mereka. Akibatnya, banyak negara Teluk memulai diplomasi dengan Iran. Misalnya, ada kesepakatan penting antara Arab Saudi dan Iran untuk memulihkan hubungan diplomatik melalui mediasi Tiongkok pada tahun 2023. Kesepakatan ini menandai pergeseran perspektif keamanan wilayah dari konflik ke perundingan.

Konflik Iran-Amerika Serikat memiliki konsekuensi ekonomi global yang signifikan. Pasar minyak global langsung menanggapi setiap eskalasi. Iran mengancam akan menutup Selat Hormuz sebagai tanggapan atas tekanan dari Barat. Karena jalur ini melewati hampir 20% pasokan minyak dunia, ancaman ini tidak hanya retorika. Jika Selat Hormuz terganggu, harga minyak di seluruh dunia dapat melonjak drastis, menyebabkan krisis energi yang meluas di negara-negara konsumen minyak seperti Tiongkok, India, dan Eropa. Oleh karena itu, konflik yang terjadi antara Iran dan Amerika Serikat memiliki konsekuensi yang lebih besar daripada sekedar masalah bilateral, tetapi juga memiliki dampak global.

Selain itu, kekuatan global seperti Rusia dan China mendukung Iran. Rusia dan China melihat Iran sebagai sekutu strategis untuk melawan dominasi Amerika Serikat. Rusia

mendukung Iran di berbagai forum internasional dan bekerja sama militer dengan Teheran, termasuk dalam konflik Suriah. Di sisi lain, China menjalin hubungan ekonomi jangka panjang dengan Iran melalui investasi dan pembelian minyak dari Iran, bahkan setelah sanksi Amerika Serikat diberlakukan. Keinginan Beijing dan Moskow untuk mempertahankan hubungan dekat dengan Iran menunjukkan konflik hegemoni global antara Barat dan blok Eurasia.

Organisasi internasional seperti Uni Eropa, IAEA, dan PBB memainkan peran penting dalam situasi seperti ini. Uni Eropa telah membantu Iran dan negara-negara besar beberapa kali. Peran ini menunjukkan komitmen multilateral untuk menghentikan proliferasi senjata, meskipun tidak selalu berhasil. Di sisi lain, IAEA terus menjalankan fungsi pengawasan dan inspeksi atas fasilitas nuklir Iran, meskipun kerja mereka sering terganggu oleh hambatan administratif dan ketegangan diplomatik.

Selanjutnya, kita juga harus mempertimbangkan dinamika ekonomi politik internasional yang mendorong ketegangan antara kedua negara tersebut. Kebijakan luar negeri suatu negara dipengaruhi oleh posisinya dalam ekonomi global saat ini, bukan hanya doktrin atau militer. Dalam situasi ini, sanksi ekonomi yang diterapkan Amerika Serikat menjadi sarana utama untuk meningkatkan tekanan terhadap Iran. Sanksi tersebut memengaruhi sektor perbankan dan energi serta menghentikan Iran dari menggunakan sistem keuangan internasional (SWIFT). Ini menghalangi penjualan minyak Iran secara legal, menghalangi investasi asing, dan menekan stabilitas ekonomi Iran, yang pada akhirnya menyebabkan tekanan politik di dalam negeri.

Namun, Iran tidak benar-benar terisolasi dalam situasi ini. Negara besar lainnya seperti China dan Rusia muncul sebagai mitra strategis, memberi Iran ruang untuk bergerak secara ekonomi dan politik. Misalnya, pada tahun 2021, China menandatangani perjanjian kerja sama strategis 25 tahun dengan Iran yang mencakup investasi dalam energi, infrastruktur, dan teknologi. Di tengah embargo Barat, China terus membeli minyak Iran dengan harga murah, memberikan pemerintah Iran sumber pendapatan penting. Selain manfaat ekonominya, kesepakatan ini memiliki makna simbolis yang membentuk blok alternatif yang menentang hegemoni Amerika Serikat di wilayah dan di seluruh dunia.

Dengan cara yang sama, Rusia menawarkan dukungan strategis kepada Iran di berbagai arena internasional. Dalam konflik Suriah, kolaborasi kedua negara terlihat jelas: Rusia dan Iran mendukung rezim Bashar al-Assad di tengah oposisi yang sebagian besar didukung oleh Barat. Kedua belah pihak menunjukkan kerja sama strategis militer dan diplomatik dalam konflik ini. Rusia sering menjadi pengimbang atas proposal sanksi tambahan terhadap Iran di forum Dewan Keamanan PBB. Di tengah tekanan terus-menerus dari Amerika Serikat dan

sekutunya di Eropa dan Timur Tengah, hubungan trilateral Iran, Rusia, dan China berfungsi sebagai poros kekuatan tandingan secara tidak langsung.

Di sisi lain, Iran menggunakan strategi perang asimetris untuk meningkatkan pengaruh regionalnya dengan mendukung aktor non-negara seperti Hizbullah, Houthi, dan milisi Syiah di Irak. Iran menganggap strategi ini efektif karena memungkinkan mereka melawan dominasi militer Barat tanpa melakukan konfrontasi langsung. Namun, metode ini membuat konflik lebih kompleks dan memperluasnya. Konfrontasi tidak lagi terjadi antara dua negara, tetapi lebih seperti konflik proksi di berbagai wilayah—mulai dari Yaman, Lebanon, Suriah, hingga Irak. Ini meningkatkan risiko ketidakstabilan dan membawa aktor bersenjata non-negara ke arena konflik regional.

Sementara itu, ketegangan ini menguji legitimasi sistem non-proliferasi global dari sudut pandang hukum internasional. Ini adalah titik penting di mana perdebatan mengenai hak Iran untuk mengembangkan teknologi nuklir yang didasarkan pada Traktat Non-Proliferasi Nuklir (NPT) telah mencapai titik kritis. Iran mengklaim bahwa negara berkembang memiliki hak untuk mengembangkan energi nuklir secara damai, menurut Pasal IV Perjanjian Perjanjian Nuklir. Namun, pihak Barat, terutama Amerika Serikat dan juga Israel sebagai aliansi Amerika Serikat, percaya bahwa Iran menyalahgunakan hak ini dan mungkin mengembangkan senjata nuklir. Karena ketidakpercayaan ini, konflik nuklir muncul antara kedua belah pihak. Namun, lembaga seperti IAEA telah menyatakan dalam beberapa laporan bahwa tidak ada bukti langsung bahwa Iran sedang membangun senjata nuklir.

Di tengah-tengah ketidakpastian ini, organisasi seperti IAEA (International Atomic Energy Agency) bertanggung jawab atas verifikasi dan inspeksi fasilitas nuklir Iran. Namun, kendala diplomatik dan teknis sering menghalangi pelaksanaan pengawasan ini. Kadang-kadang, Iran membatasi akses inspektur internasional sebagai bentuk protes terhadap pelanggaran janji Barat, seperti penundaan pencabutan sanksi atau tindakan militer di kawasan. Namun, Barat melihat pembatasan tersebut sebagai tanda bahwa Iran menyembunyikan tindakan mencurigakan. Ketidakpercayaan ini menyebabkan proses verifikasi menjadi lebih sulit dan mengurangi kredibilitas perjanjian nuklir yang sudah ada.

Konflik ini menunjukkan banyak hal, bukan hanya pertarungan kekuatan militer dan geopolitik, tetapi juga menunjukkan perbedaan nilai dan sistem politik antara Iran dan Amerika Serikat. Sejak Revolusi Islam 1979, Iran menempatkan dirinya sebagai lawan dari prinsip liberal demokratis Amerika Serikat. Ini menambah lapisan ideologis ke konflik yang telah sangat kompleks secara geopolitik sebelumnya. Media di berbagai negara juga memperkuat cerita ini, menggambarkan Iran sebagai kekuatan imperialis yang campur tangan dalam urusan

domestik negara lain dan Amerika Serikat sebagai rezim otoriter yang mendukung terorisme dan mengancam stabilitas global.

Selain itu, transformasi yang terjadi di dunia media dan penggunaan media sosial juga memengaruhi persepsi dan opini publik di seluruh dunia. Pemerintah Iran berbagi cerita mereka dengan dunia internasional melalui platform seperti Press TV, Telegram, dan Twitter. Sebaliknya, media Barat menguasai media internasional dengan retorika keras yang menentang kebijakan internasional Iran. Propaganda digunakan oleh perang informasi, menyulitkan masyarakat global untuk memahami realitas lapangan secara objektif.

Secara keseluruhan, konflik Iran-Amerika Serikat mengenai program nuklir menunjukkan bahwa krisis global saat ini tidak lagi linear dan sederhana. Ia menampilkan konflik internal, konflik geopolitik, keyakinan, hukum internasional, ekonomi global, dan perang informasi. Oleh karena itu, menggunakan strategi kebijakan yang hanya berfokus pada tekanan atau isolasi terhadap Iran akan menjadi tidak efektif. Metode seperti ini justru memperkuat unsur-unsur yang keras di Iran, menghambat percakapan, dan memperluas tingkat ketegangan di wilayah tersebut.

Oleh karena itu, penyelesaian konflik harus melibatkan pemulihan kepercayaan melalui diplomasi yang inklusif dan dilakukan oleh tiga atau lebih negara. Negara-negara kawasan seperti Turki, Qatar, dan Oman dapat berfungsi sebagai mediator netral yang menjembatani komunikasi antara Iran dan pihak Barat khususnya Amerika Serikat. Selain itu, solusi jangka panjang seperti perjanjian keamanan regional atau kawasan yang melibatkan semua aktor utama, termasuk Iran, dapat muncul. Untuk mengurangi kecemasan dan memungkinkan rekonsiliasi, transparansi nuklir, pertukaran informasi militer, dan penguatan peran IAEA adalah langkah-langkah untuk meningkatkan kepercayaan antara kedua pihak.

Dalam jangka panjang, stabilitas di Timur Tengah tidak dapat dicapai hanya dengan kekuatan militer atau tekanan ekonomi. Sebaliknya, orang-orang harus bekerja sama untuk menjaga perdamaian, menghormati kedaulatan setiap negara, dan mendukung pembangunan berkelanjutan. Iran tidak hanya merupakan ancaman dalam konteks ini, tetapi juga seorang aktor penting yang dapat membantu membangun struktur keamanan regional yang lebih inklusif dan berkelanjutan jika diajak berkontribusi secara positif.

## **5. KESIMPULAN DAN SARAN**

Kompleksitas dinamika geopolitik di Timur Tengah ditunjukkan oleh konflik antara Iran dan Amerika Serikat terkait program nuklir Iran. Selain masalah teknis terkait pengayaan uranium atau kesepakatan JCPOA, konflik ini juga disebabkan oleh kepercayaan, sejarah, dan

strategi pertahanan masing-masing negara. Dari sudut pandang geopolitik, Iran memiliki keunggulan yang signifikan dalam sistem keamanan energi global karena lokasinya yang strategis di dekat Selat Hormuz. Iran memperluas pengaruh regionalnya secara asimetris dengan memanfaatkan faktor ini dan mendukung aktor non-negara seperti Hizbullah dan Houthi.

Pendekatan teori *balance of threat* menunjukkan bagaimana persepsi ancaman terhadap Iran telah mendorong pembentukan aliansi tidak resmi antara Amerika Serikat, Israel, dan negara-negara Teluk. Akibatnya, Iran telah menanggapi dengan lebih kuat. Dalam situasi seperti ini, terjadi fenomena dilema keamanan di mana upaya pertahanan satu pihak dianggap sebagai ancaman oleh pihak lain. Akibatnya, lingkaran ketegangan menjadi lebih kuat.

Selain itu, analisis kebijakan luar negeri menunjukkan bahwa arah kebijakan luar negeri kedua negara sangat dipengaruhi oleh dinamika domestik dan perubahan kepemimpinan di Iran dan AS. Kebijakan maksimum tekanan yang diterapkan selama administrasi Trump memperburuk keadaan, melemahkan posisi diplomatik pihak moderat di Iran, dan memperkuat kelompok konservatif yang lebih agresif. Namun, dukungan yang diberikan oleh negara-negara besar seperti China dan Rusia terhadap Iran menunjukkan bahwa perselisihan ini tidak lagi terbatas pada hubungan bilateral, tetapi telah menjadi bagian dari konflik geopolitik global yang lebih luas. Ketegangan ini membahayakan stabilitas wilayah. Instabilitas politik dan ekonomi di wilayah tersebut disebabkan oleh konflik proksi, ketegangan militer, dan sanksi ekonomi yang berlangsung lama. Ini juga meningkatkan risiko konflik terbuka. Dengan Selat Hormuz berfungsi sebagai jalur energi penting di seluruh dunia, ia menjadi titik penting dalam proses ini karena ancaman gangguan yang dapat menyebabkan krisis energi global.

Oleh karena itu, tidak mungkin untuk menyelesaikan konflik Iran-Amerika Serikat hanya dengan menggunakan kekuatan militer atau menekan satu pihak. Strategi diplomatik yang inklusif dan multilateral, dengan keterlibatan negara-negara kawasan dan lembaga internasional seperti IAEA, sangat penting. Untuk menumbuhkan kepercayaan dan menciptakan stabilitas jangka panjang di Timur Tengah, transparansi nuklir, penguatan kerja sama regional, dan dialog antarideologi sangat penting. Iran memiliki kemampuan untuk membangun struktur keamanan untuk wilayah yang lebih damai dan berkelanjutan jika mereka diizinkan untuk bertindak.

## DAFTAR REFERENSI

- Anonymous. (2025). Iran's Supreme Leader says Trump is lying when he speaks of peace. *Reuters*. <https://www.reuters.com/world/irans-president-pezeshkian-says-trump-speaks-peace-threatens-same-time-2025-05-17/>
- Bahgat, G. (2006). Nuclear proliferation: The Islamic Republic of Iran. *Iranian Studies*, 39(3), 307–327.
- Borck, T., & Dolzikova, D. (2022). Chain reactions: The Iranian nuclear programme and Gulf security dynamics. *Royal United Services Institute*. <https://www.rusi.org/explore-our-research/publications/occasional-papers/chain-reactions-iranian-nuclear-programme-and-gulf-security-dynamics>
- Cordesman, A. H., & Kleiber, M. (2007). *Iran's military forces and warfighting capabilities: The threat in the Northern Gulf*. CSIS.
- Dolzikova, D., & Borck, T. (2022). Nuclear diplomacy with Iran and regional perceptions. *Institute for Peace and Diplomacy*. <https://peacediplomacy.org/2022/11/17/nuclear-diplomacy-with-iran-and-regional-perceptions/>
- Herison, H. (2024). The conflict of Iran and the USA post Arab Spring in the Middle East. *Ampera: A Research Journal on Politics and Islamic Civilization*, 5(1), 28–35. <https://doi.org/10.19109/ampera.v5i01.22867>
- Horschig, D., & Schiff, B. (2025). What factors drive U.S.-Israeli differences on Iran's nuclear challenge? *Center for Strategic and International Studies*. <https://www.csis.org/analysis/what-factors-drive-us-israeli-differences-irans-nuclear-challenge>
- Irawan, D. (2021). Dinamika keamanan kawasan Timur Tengah dalam persaingan Amerika Serikat dan Iran. *Dauliyah: Journal of Islamic and International Affairs*, 6(2), 221–248.
- Kelsey Davenport. (2019). Assessing the risk posed by Iran's violations of the nuclear deal. *Arms Control Association*. <https://www.armscontrol.org/issue-briefs/2019-12/assessing-risk-posed-iran-violations-nuclear-deal>
- Koblentz, G. D. (2014). Strategic stability in the second nuclear age. *Council on Foreign Relations*.
- Korshenko, A. (2025). Understanding U.S. foreign policy in Iran and the Middle East: A general review study. *International Journal of Humanities and Education Development (IJHED)*, 7(1), 12–19. <https://doi.org/10.22161/jhed.7.1.3>
- Litwak, Robert S. (2021). Iran's nuclear challenge at a crossroads: Dilemmas of a threshold state. <https://www.wilsoncenter.org/article/irans-nuclear-challenge-crossroads-dilemmas-threshold-state>
- Mackinder, H. J. (1904). The geographical pivot of history. *The Geographical Journal*, 23(4), 421–437.

- Meier, O. (2013). European efforts to solve the conflict over Iran's nuclear programme: How has the EU performed? *Nonproliferation Papers*, 27(1), 1–21.
- Mustofa, A. Z. (2023). Kebijakan luar negeri Iran terhadap Amerika Serikat di bawah kepemimpinan Hassan Rouhani. *Populika: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(1), 14–22. <https://doi.org/10.37631/populika.v1i1.725>
- Mustofa, A. Z., & Syarifah, N. (2021). Politik ofensif Amerika Serikat terhadap sikap defensif Iran: Dari perang proksi hingga dominasi. *Indonesian Journal of International Relations*, 5(2), 118-139. <https://doi.org/10.32787/ijir.v5i2.203>
- Paramasatya, S., & Wiranto, S. (2019). Konfrontasi Amerika Serikat dan Iran dalam Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA). *Jurnal Hubungan Internasional*, 12(2), 298–299. <https://doi.org/10.20473/jhi.v12i2.14047>
- Rodriguez, L. F. (2022). The nuclear verification process for Iran: Can it be trusted? *Medium*. <https://luisafrodriguez.medium.com/irans-nuclear-verification-process-can-it-be-trusted-59df69fa5a31>
- Samaan, J.L. (2017). Missile warfare and violent non-state actors: The case of Hezbollah. *Defence Studies*, 17(2), 156–170. <https://doi.org/10.1080/14702436.2017.1295788>
- Solmaz, T. (2022). Non-state-led proxy warfare: The missing link in the proxy wars debate. *Small Wars Journal*. <https://smallwarsjournal.com/jrnl/art/non-state-led-proxy-warfare-missing-link-proxy-wars-debate>
- Veen, Erwin van. (2020). Evolution of the Middle East as the JCPOA's strategic environment. *Clingendael Institute*. <https://www.clingendael.org/pub/2020/coming-out-and-breaking-out/2-evolution-of-the-middle-east-as-the-jcpoas-strategic-environment/>
- Walt, S. M. (1987). *The origins of alliances*. Cornell University Press.